
**PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL SEBAGAI STRATEGI MENGURANGI
PENGANGGURAN AKIBAT URBANISASI DI WILAYAH PINGGIRAN PERKOTAAN
(Studi Kasus: Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor)**

Oleh
Ratu Desy Savitri
Perencana Ahli Muda pada Bapperida Kota Bogor
Email : ratudesy13@gmail.com

Article History:

Received: 01-05-2026

Revised: 28-05-2026

Accepted: 01-06-2026

Keywords:

Urbanisasi,
Pengangguran,
Pemberdayaan
Ekonomi Lokal

Abstract: *Tulisan ini mengkaji permasalahan pengangguran sebagai dampak dari isu strategis perkotaan yakni urbanisasi. Fokus penulisan adalah pada strategi Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) berbasis kluster guna mengatasi pengangguran di wilayah pinggiran Kota Bogor, yakni Kelurahan Katulampa. Dipilihnya Kelurahan Katulampa karena berada di wilayah Timur terluar Kota Bogor dan terletak di titik strategis lintasan pergerakan ekonomi Nasional. Selain itu, wilayah administrasi Kelurahan Katulampa disentuh oleh rencana proyek pembangunan infrastruktur strategis Nasional. Tujuan kajian adalah merumuskan, menganalisis beberapa alternatif kebijakan untuk memperoleh satu rekomendasi kebijakan yang paling tepat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di Kelurahan Katulampa. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisa permasalahan adalah metode deskriptif kualitatif. Data yang dianalisa adalah data sekunder berupa data statistik, baik tabel, gambar atau grafik, dan hasil pengamatan visual di lapangan dan media informasi digital dan non digital. Landasan teoritis dan hukum yang digunakan adalah pernyataan-pernyataan teoritis, kajian dan jurnal, serta kebijakan yang terkait dan mendukung analisa guna memperoleh solusi terhadap rumusan masalah. Kebijakan terpilih yang direkomendasikan adalah menyusun perencanaan jangka menengah bagi Pengembangan Ekonomi Lokal berbasis 3 kluster yakni UMKM, kampung tematik, dan pariwisata. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) berbasis kluster yang berhasil akan berdampak pada meningkatnya penghasilan dan mendorong ekonomi lokal, mendorong pemerintah membuat kebijakan yang membuka akses pasar lebih luas, mendorong terbukanya akses permodalan bagi para pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan pembangunan infrastruktur yang mendukung perluasan akses pasar dan efisiensi produk*

PENDAHULUAN

Berdasarkan data BPS, data migrasi Kota Bogor Tahun 2022 mencapai 11.827 pendatang. Angka ini menempatkan Kota Bogor di urutan ke 3 tertinggi dari 9 kota se-Jawa Barat, setelah Kota Bandung dan Kota Bekasi. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk, migrasi Kota Bogor Tahun 2022 adalah 1,11%. Dengan angka tersebut, Kota Bogor berada di urutan 6 dari 27 kabuapten/kota se-Jawa Barat. Cukup tingginya migrasi penduduk dari luar masuk ke Kota Bogor didorong oleh perannya sebagai kawasan penyangga Jakarta (Jabodetabek), serta ditunjang oleh aksesibilitas, fasilitas, dan iklim yang lebih sejuk dibandingkan Jakarta. Dampak urbanisasi ini salah satunya ditandai dengan peningkatan penduduk yang signifikan—mencapai 1.070.719 jiwa pada 2023 (RPD Bapperida Kota Bogor).

Migrasi masuk ke Kota Bogor dalam periode 2005-2023 dicirikan oleh penduduk yang relatif miskin. Penduduk miskin yang masuk ke dalam Kota Bogor dominan bermata pencaharian di sektor informal yang tampaknya belum sepenuhnya mendapatkan pelayanan peningkatan usaha-usaha ekonomi produktif dan pendidikan. Hal ini menjadi salah satu cenderung memperlambat kenaikan IPM Kota Bogor. Para migran ini cenderung memilih tinggal di kawasan pinggiran kota, dimana secara umum biaya hidup lebih murah. Sisi negatif peningkatan kepadatan penduduk ini memicu alih fungsi lahan dan memicu tumbuhnya kawasan permukiman tidak terencana (kumuh).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat menunjukkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bogor selalu berada di 4 besar dari TPT 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat. Faktor urbanisasi, persaingan ketat, hingga perubahan teknologi di sektor industri disebut menjadi pemicu utama. Sebagai kota penyangga Jakarta dan daerah dengan banyak lembaga pendidikan, Kota Bogor memiliki banyak lulusan perguruan tinggi setiap tahunnya. Namun, tidak semua lulusan dapat langsung diserap pasar kerja di dalam kota. Banyaknya tenaga kerja terampil yang mencari pekerjaan di sektor formal membuat persaingan semakin ketat.

Faktor lain penyebab meningkatnya pengangguran di wilayah pinggiran kota atau peri-urban adalah kurang berdayanya masyarakat secara ekonomi.

Hal ini melemahkan daya beli dan menyebabkan perlambatan ekonomi lokal yang akhirnya memicu lebih banyak PHK dan menghambat pertumbuhan bisnis. Penyebab kurang berdayanya masyarakat di wilayah pinggiran perkotaan secara ekonomi antara lain adalah dikarenakan terbatasnya penghasilan, ketrampilan, permodalan dan akses pendidikan yang berkualitas yang membuat mereka rentan terhadap pengangguran struktural dan siklus kemiskinan. Tidak sedikit warga pinggiran kota yang memiliki tingkat pendidikan rendah atau tidak memiliki ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja modern dan membuat mereka kalah bersaing dalam mencari pekerjaan formal yang stabil.

Selain itu, kurangnya perluasan kemitraan dalam berinvestasi dan dukungan wirausahawan bagi terbukanya akses pasar yang lebih luas turut menjadi penyebab. Minimnya ketersediaan lapangan kerja akibat kurangnya investasi di wilayah pinggiran kota turut memberikan andil dalam pertambahan angka pengangguran. Faktor lainnya adalah infrastruktur yang kurang mendukung dan membatasi akses pasar dan efisiensi produksi. Jarak tempuh yang jauh berakibat pada tingginya biaya transportasi menuju lokasi pusat-pusat pekerjaan yang ada di pusat kota.

Faktor kebijakan turut menentukan keberhasilan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kebijakan yang terfokus pada permasalahan di area perkotaan, berdampak wilayah pinggiran kota kurang mendapatkan dukungan kebijakan yang memadai untuk menyelesaikan masalah ekonomi mereka. Kebijakan dengan perumusan kurang matang dan terburu-buru diterapkan turut menghambat upaya pemberdayaan ekonomi warga di wilayah pinggiran kota. Konorop (Jurnal Intelek Insan cendekia, 2024) Keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan ekonomi masih terbatas, sehingga beberapa program yang diterapkan kurang efektif.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena, situasi sosial, atau obyek penelitian secara mendalam. Data yang dianalisa adalah data sekunder berupa data statistik, baik tabel, gambar atau grafik, dan hasil pengamatan visual di lapangan dan media informasi digital dan non digital. Landasan teoritis dan hukum yang digunakan adalah pernyataan-pernyataan teoritis, kajian dan jurnal, serta kebijakan yang terkait dan mendukung analisa guna memperoleh solusi terhadap rumusan masalah. Dalam merumuskan kebijakan, digunakan metode Bardach (2012), yakni Metode 4 kriteria kebijakan yang harus dipenuhi. Kriteria tersebut Technical Feasibility, Economic & Financial Possibility, Political Feasibility, dan Administrative Operatibility.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Urbanisasi Terhadap Perekonomian Di Wilayah Pinggiran Perkotaan.

Seperti yang terjadi di seluruh daerah di Indonesia, perekonomian Kota Bogor sempat terpukul saat terjadi bencana Covid-19. Pada gambar di bawah, terlihat pelambatan ekstrem Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bogor. Namun terlihat kembali naik di angka hingga 2022. Hal ini antara lain karena bertumbuhnya usaha-usaha baru skala rumahan atau industri mikro kecil dengan pemasaran secara online dari kelompok pegawai yang terkena PHK akibat tempat kerja mereka terdampak Covid-19. LPE Kota Bogor kembali turun di angka 5,1 pada Tahun 2023 dan melandai di 2024 di angka 5,15. Pola pertumbuhan ini mencerminkan adanya pemulihan yang relatif cepat pasca pandemi, namun diikuti oleh fase stabilisasi yang menunjukkan perlunya intervensi strategis.



Gambar 3.1. Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Sumber: BPS Kota Bogor

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang rendah akibat bertambahnya populasi akan memperburuk masalah pengangguran. Arus urbanisasi yang tinggi cenderung terjadi di wilayah pinggiran perkotaan. Mahalnya biaya hidup dan harga rumah tinggal di pusat kota menjadi salah satu alasan yang mendorong para urban memilih bermukim di pinggiran kota. Akibatnya terjadi alih fungsi lahan ke arah permukiman. Pembangunan fisik di daerah pinggiran kota akan mengakibatkan perubahan pada pola mata pencaharian penduduk asli ke arah non pertanian, dan tidak semua dari mereka terserap oleh bisnis lain yang ada. Meningkatnya permintaan pangan akibat penambahan penduduk mendorong tumbuhnya usaha mikro dan kecil berskala rumah tangga di ritel, restoran, warung makan, dan jasa.

Di sisi lain, meningkatnya permintaan konsumsi lokal ini mendorong naiknya harga bahan baku sekaligus menjadi beban ekonomi seluruh masyarakat lokal, termasuk para migran. Kebutuhan ekonomi memaksa para migran yang kalah bersaing di dunia kerja untuk bekerja seadanya. Pekerjaan yang tersedia di wilayah pinggiran sering kali tidak memerlukan karyawan dengan latar belakang pendidikan formal atau dengan keahlian khusus. Usaha di wilayah pinggiran kota lebih banyak didominasi bisnis di sektor informal, seperti pedagang kecil atau pekerja lepas.

Warga dengan pendapatan rendah menjadi sulit untuk menjangkau lowongan di tempat kerja baru yang terletak jauh dari lokasi tempat tinggal karena perlu ada biaya transportasi yang tidak sedikit. Penghasilan kecil dan tidak stabil semakin menjauhkan mereka dari akses permodalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, ketrampilan yang lebih baik. Dukungan kebijakan turut berperan dalam penyelesaian masalah pengangguran yang muncul akibat urbanisasi. Kolaborasi dengan investor dan wirausahawan akan membuka akses pasar lebih luas. Kebijakan-kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi di wilayah pinggiran perkotaan akan mampu mendorong ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Laju Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Pengangguran, dan Tenaga Kerja.

Laju Pertumbuhan Penduduk adalah gambaran rata-rata tingkat penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu dan berdampak terhadap ekonomi, lingkungan, dan sumber daya suatu wilayah. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah tingginya arus urbanisasi dan migrasi. Tercatat oleh Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor bahwa terjadi perpindahan penduduk ke dalam Kota Bogor sebesar 739 jiwa pada tahun 2023. Sementara perpindahan penduduk keluar Kota Bogor lebih kecil yakni 700 jiwa.

Namun demikian, upaya menekan angka pengangguran harus terus dioptimalkan ke depannya. Hal ini dikarenakan angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) cenderung melaju bila dilihat pada Gambar 1.2. di atas. TPAK menggambarkan ketersediaan pasokan tenaga kerja usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Artinya, ketersediaan angkatan kerja cenderung bertambah ke depannya dan persaingan dalam dunia kerja akan semakin tinggi. Mereka yang kalah bersaing akan berpotensi sebagai pendorong meningkatnya pengangguran di wilayah pinggiran kota.

Karakteristik Kelurahan Katulampa.

Seiring dengan pertumbuhan populasi dan meningkatnya kebutuhan ruang permukiman, lahan terbangun diprediksi akan semakin meluas ke arah Selatan dan Timur, mengarah ke wilayah perbatasan dengan Kabupaten Bogor (RPJMD Kota Bogor 2025-2029).

Posisi Strategis dan Keunggulan Akses Kel. Katulampa.

Salah satu wilayah kota Bogor yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan baru adalah Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur. Hal ini dikarenakan posisinya yang strategis dan adanya beberapa pembangunan infrastruktur penting serta rencana pindahnya pusat pemerintahan Kota Bogor ke Kelurahan Katulampa.

Sisi Timur Kelurahan Katulampa dibatasi jalan tol Jagorawi yang terhubung dengan jalur tol ke Pulau Jawa bagian Timur. Wilayah di Timur tol adalah Kecamatan Sukaraja yang menjadi destinasi wisata populer di Kabupaten Bogor. Pertumbuhan pusat-pusat baru di sekitar Kota Bogor turut andil dalam mempengaruhi sentralitas Kota Bogor dalam perdagangan, jasa, dan MICE serta dapat menurunkan fungsi Kota Bogor sebagai gerbang pergerakan ekonomi untuk wilayah sekitar seperti Kabupaten Bogor. Kelurahan Katulampa dikelilingi akses transportasi baik ke kawasan internal kota mau pun eksternal kota. Kemudahan akses ini menjadi salah satu faktor pendorong urbanisasi ke Kota Bogor di wilayah peri-urban Kelurahan Katulampa. Lokasi strategis Kelurahan Katulampa berpotensi menjadi peluang sekaligus tantangan bagi berkembangnya perekonomian di wilayah tersebut.

Kelurahan Katulampa adalah 1 dari 6 kelurahan di Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, yang terkenal dengan Bendungan Katulampa yang memiliki fungsi penting dalam mengatur debit air dari Puncak dan disalurkan menuju Kota Jakarta. Dengan luas wilayah 491 hektar menjadikan Katulampa adalah kelurahan terluas di Kecamatan Bogor Timur. Katulampa terletak berbatasan di sisi Utara dengan Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara. Di sisi Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tajur Kecamatan Bogor Selatan. Di sisi Timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor, tepatnya Kelurahan Sukaraja, dan di sisi Barat berbatasan dengan Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur.

Sepe3rti yang diperlihatkan pada Gambar 2.2., populasi Kelurahan Katulampa berjumlah 40.270 jiwa dan terdiri dari 123 RT dan 21 RW. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan pembangunan infrastruktur mengakibatkan perubahan fungsi lahan dari pertanian menjadi permukiman dan bisnis. Data terakhir per Juni 2025, luas lahan permukiman adalah 365,31 Ha, yang artinya menempati 74,4% dari total luas wilayah kelurahan. Katulampa merupakan salah satu kawasan di Kota Bogor Timur yang didominasi oleh beragam bangunan tempat tinggal kelas menengah ke atas.

Fasilitas Publik.

Selain berbagai jenis perumahan, Kelurahan Katulampa juga memiliki berbagai fasilitas publik yang dapat menunjang kehidupan masyarakatnya seperti sarana pendidikan, rumah ibadah, hingga kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan sandang dan pangan. Berdasarkan data kelurahan, fasilitas umum menempati area dengan total luas 46,07 Ha atau hanya 9,3% dari total luas wilayah. Fasilitas umum ini terdiri dari perkantoran pemerintahan, ruang publik, tempat pemakaman umum, tempat pembuangan sampah, bangunan sekolah/ perguruan tinggi, pertokoan, jalan, usaha perikanan, sutet/aliran listrik tegangan tinggi.

Posisi Strategis Katulampa.

Potensi Demografi.

Kelurahan Katulampa memiliki karakteristik demografi yang cukup menonjol; dengan persentase populasi terbesar dibandingkan kelurahan lainnya di Kecamatan Bogor Timur, berkontribusi sebesar 32,9% dari total populasi dengan kepadatan 8.148,27 orang/Km. Jumlah total penduduk Kelurahan Katulampa 40.008 orang yang terdiri dari 20.882 laki-laki dan 19.126 perempuan. Jumlah total angkatan kerja Kelurahan Katulampa per Juni 2025 adalah 17.271 orang, dimana jumlah angkatan kerja yang bekerja adalah 13.817 orang dan yang tidak bekerja adalah 3.454 orang. Dengan demikian Tingkat Pengangguran Terbuka di Kelurahan Katulampa adalah 20%. Tidak diperoleh data berapa dari jumlah 20% tersebut yang tidak bekerja karena masih sekolah. Namun 20% adalah jumlah yang harus dipersiapkan lapangan kerjanya melalui program-program Pemerintah untuk memperkecil angka pengangguran di masa depan.

Berdasarkan sektor pekerjaan menunjukkan bahwa karyawan swasta adalah yang terbanyak yakni 2.872 orang atau sekitar 14,5% dari total populasi yang bekerja. Terbanyak kedua adalah PNS 1.981 orang, diikuti pengusaha usaha kecil, menengah, besar 690 orang, lalu 479 orang. Hal ini mencerminkan adanya potensi ekonomi yang cukup kuat di Kelurahan Katulampa, didukung tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan. Di sisi lain, buruh harian lepas berjumlah 3.622 orang atau sekitar 11% dari total populasi yang bekerja. Ini memperlihatkan adanya sekelompok masyarakat yang masih rentan secara ekonomi dan membutuhkan perhatian lebih dalam hal peningkatan ketrampilan dan stabilitas pekerjaan. Dari segi pendidikan, masyarakat tamat SD sebesar 35,15%. Kemudian disusul tamat SMA sederajat 25,43%, lalu tamat Perguruan Tinggi 19,67% dan terakhir adalah tamat SMP sebesar 13,96%. Meskipun jumlah masyarakat yang hanya tamat SD adalah yang terbesar, namun yang berhasil menyelesaikan SMA dan Perguruan Tinggi lebih kurang setengah dari populasi angkatan kerja. Hal ini menggambarkan bahwa angkatan kerja masyarakat Kelurahan Katulampa cukup berkualitas.

Potensi Pertanian dan Peternakan.

Lahan yang dimanfaatkan untuk pertanian tidak sangat luas, namun masyarakat Kelurahan Katulampa cukup produktif. Terdapat 1.060 keluarga yang memiliki tanah pertanian kurang dari 10 Ha. Komoditas yang ditanam adalah Ubi Jalar, Tomat, Kacang Kedelai, Terong, Ubi Kayu. Dari 7621 keluarga perkebunan, hanya 296 yang memiliki tanah perkebunan dan kurang dari 10Ha. Komoditi yang dihasilkan adalah Alpokat, Pepaya dan Pisang. Hasil pertanian ini dipasarkan ke KUD, tengkulak, pengecer, lumbung desa selain untuk dikonsumsi sendiri. Selain tanaman pertanian, terdapat peternak sapi, ayam kampung, bebek, kambing, domba, angsa, burung puyuh, serta hasil ternak berupa susu, kulit, dan daging. Terdapat beberapa usaha budi daya ikan air tawar berupa karamba dan empang yang dimanfaatkan sebagai kolam pancing untuk menambah penghasilan warga dengan hasil ikan 250 ton/thn.

Dilihat dari ragam tanaman pangan dan produk peternakan yang ada, Kelurahan Katulampa memiliki komoditas pangan yang cukup lengkap. Dari sisi jumlah sepertinya sudah dalam jumlah untuk dipasarkan selain untuk dikonsumsi sendiri. Beberapa produk bisa bernilai sangat ekonomis melalui upaya diversifikasi. Contohnya susu yang diolah menjadi keju, yoghurt, dan mentega nilai jual lebih tinggi. Dalam skala usaha, strategi ini mengurangi ketergantungan pada satu sumber saja, sehingga kerugian dari satu area dapat

diimbangi dengan keuntungan dari area lain. Adalah peran dan tugas Pemerintah untuk memfasilitasi dan memberikan pelatihan ketrampilan diversifikasi produk.

Ketersediaan Infrastruktur.

Infrastruktur di Kelurahan Katulampa secara umum tergolong baik. Jaringan jalan kolektor sekunder. Jarak ke ibu kota kecamatan sepanjang 2 Km dan jarak ke ibu kota Kota Bogor adalah 7 Km. Kelurahan Katulampa tidak memiliki pasar di wilayahnya, sehingga untuk menjual produknya perlu transportasi keluar. Untuk kebutuhan layanan listrik, sudah seluruh warga menggunakan PLN. Kebutuhan air bersih sebagian besar diperoleh dari PDAM. Beberapa warga memanfaatkan sumur gali sebanyak 4.262 unit dan sumur pompa sebanyak 12 unit.

Potensi Perekonomian.

Data potensi ekonomi Kelurahan Katulampa menunjukkan adanya beberapa lembaga ekonomi yang berperan sebagai pendorong pemberdayaan masyarakat, memfasilitasi kegiatan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan. Koperasi yang dimiliki Kelurahan Katulampa ada beberapa jenis, yakni Koperasi PNS 6 unit, Koperasi Serba Usaha 14 unit, Koperasi Karyawan 14 unit, Koperasi syariah 1 unit, dan koperasi lainnya 50 unit. Selain itu terdapat rumah makan dan restoran sebanyak 100 unit usaha.

Potensi Pariwisata.

Sejauh ini, sumbangan PAD Kota Bogor terbesar berasal dari pariwisata. Kelurahan Katulampa memiliki beberapa potensi pariwisata yang cukup dikenal dan masih terus berkembang. Diantaranya adalah potensi Kampung Tematik Abiu Katulampa Kota Bogor ini berlokasi di Perumahan Griya Katulampa, Bogor Timur, Kota Bogor dan telah dikelola lebih dari 10 tahun. Kampung seluas 5.000 meter di pinggir Ciliwung ini sedang dikembangkan menjadi destinasi wisata agro dan edukasi berbasis buah Abiu untuk meningkatkan pendapatan warga dan menjadi objek wisata alam yang menarik, dan area pelatihan pertanian di sepanjang aliran Sungai Ciliwung. Selain itu ada Kampung Warna Warni Katulampa, yakni objek wisata di Kelurahan Katulampa, Bogor Timur, yang diinisiasi oleh warganya sendiri melalui program Gemarsawi (Gerakan Masyarakat Sadar Wilayah).

Kelurahan Katulampa juga memiliki potensi MICE (Meeting, Incentives, Conventions, and Exhibition) yang berpotensi sebagai penyumbang PAD. melalui daya tarik wisata alam dan kulinernya Kota Bogor, juga karena jaraknya yang dekat dengan Jakarta. Terdapat beberapa kelas hotel yakni tersedianya hotel non bintang sebanyak 4 buah, hotel Bintang 3 sebanyak 3 buah, dan hotel Bintang 4 sebanyak 3. Ketersediaan hotel ini menjadi pendukung sekaligus menjadi daya tarik pariwisata dan MICE di Kelurahan Katulampa sebagai alternatif wisata selain ke Sentul dan Puncak.

a. Pemberdayaan Masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat menurut Nuraini, dkk (2023) mengakui bahwa warga dan suatu komunitas memiliki pemahaman baik tentang kondisi, kekuatan, dan kelemahan mereka. Memberikan peluang kepada individu dan kelompok untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka, dengan tujuan mengubah dinamika kekuasaan dan mendorong inklusivitas. Pemberdayaan masyarakat menurut Malta (2023) merupakan suatu pendekatan yang mempunyai potensi besar dalam mengangkat perekonomian, sosial, dan budaya suatu masyarakat. Proses pemberdayaan dapat mengarah pada transformasi yang lebih berpusat pada masyarakat,

dengan partisipasi masyarakat sebagai kunci utama untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam Firmawati (at all, 2024) disampaikan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada:

1. Tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan.
2. Ketersediaan Sumber Daya seperti dana, tenaga ahli, infrastruktur, dan akses ke informasi yang memadai.
3. Pendidikan dan pengetahuan masyarakat merupakan faktor kunci dalam membangun kapasitas dan keterampilan yang diperlukan untuk mengambil peran aktif dalam program pemberdayaan
4. Kemitraan dan Kolaborasi. Kerja sama dengan pihak-pihak eksternal seperti pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta dapat memperluas jangkauan dan memperkuat efektivitas program pemberdayaan
5. Pemimpin dan Fasilitator Komunitas yang Kuat. Keberadaan pemimpin atau fasilitator yang memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat dapat membantu memandu dan memobilisasi partisipasi aktif.
6. Keterlibatan Pemerintah Lokal. Dukungan dan keterlibatan pemerintah lokal sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan masyarakat.
7. Fleksibilitas dan Responsif terhadap Perubahan. Program pemberdayaan masyarakat perlu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat untuk tetap relevan dan efektif

Tingkat partisipasi aktif warga Kelurahan Katulampa dalam program pemberdayaan diukur dari keterlibatan mereka pada setiap tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Keterlibatan yang tinggi menunjukkan bahwa program relevan dengan kebutuhan masyarakat dan memberdayakan mereka secara nyata. Telah disebutkan di awal bahwa kawasan Kelurahan Katulampa didominasi oleh beragam bangunan tempat tinggal kelas menengah ke atas. Hal ini dapat diartikan setengah dari warga Kelurahan Katulampa adalah berasal dari kelompok mampu yang mungkin merasa tidak membutuhkan pemberdayaan. Namun, mereka tetap perlu mengikuti program pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah bukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dasar, melainkan untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang mereka miliki demi kepentingan bersama.

Pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan kelompok masyarakat ekonomi menengah ke atas berfokus pada penguatan kapasitas sosial, intelektual, dan filantropi. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan potensi mereka agar dapat memberikan kontribusi yang lebih

besar bagi komunitas yang lebih luas. Dengan pendidikan dan jejaring yang luas, mereka dapat menjadi inisiator dan penggerak inovasi sosial. Contohnya, mereka dapat menciptakan platform digital untuk mempromosikan UMKM atau menggerakkan program lingkungan berbasis teknologi. Selain itu, warga dari kelas menengah ke atas sering kali memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik. Program pemberdayaan dapat mengarahkan potensi ini untuk menjadi pemimpin komunitas yang efektif, yang mampu mengelola dan memimpin proyek-proyek sosial dengan sukses. Dan pemimpin yang merupakan warga dari lingkungan Kelurahan Katulampa sendiri tentunya lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat.

b. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL).

PEL diperkenalkan pada tahun 1960 sebagai suatu pendekatan dalam pembangunan ekonomi regional (Sinaga, 2018). Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) menurut Rodriguez-Pose dan Tijmstra (dalam Mandhaputri, 2023) merupakan proses partisipatif (bottom up) di suatu wilayah dengan mendorong kolaborasi antara bisnis lokal dan Pemerintah untuk membangun rencana pembangunan kooperatif dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk memperkuat ekonomi lokal dan membuka lapangan pekerjaan.

Keberhasilan PEL dapat dinilai dari pertumbuhan peluang kerja dan usaha bagi masyarakat kecil, perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, pemberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam kegiatan produksi dan pemasaran, serta penguatan jaringan kerja melibatkan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal (Blakely & Leigh, 2010). PEL adalah kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah (top-down), dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani secara partisipatif dan kolaboratif dalam suatu kemitraan untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah secara berkelanjutan dan berkeadilan yang sebagian besar hasilnya dimanfaatkan oleh masyarakat lokal (Budiharso, 2022).

PEL yang memanfaatkan sumber daya lokal, akan banyak memberikan keuntungan, yaitu meningkatkan nilai tambah produk industri berbahan baku lokal, menyerap tenaga kerja lokal. meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan kesempatan berusaha. kebanggaan terhadap produk lokal. meningkatkan pajak pertambahan nilai maupun penghasilan. Dengan pajak yang semakin besar maka PAD juga semakin besar sehingga Pemda dapat membangun sarana dan prasarana lebih baik.

Dari sektor peternakan, hilirisasi dari produk utama seperti susu, telur, dan daging menjadi produk turunan dengan nilai jual tinggi seperti sosis, abon, dendeng, yoghurt atau keju akan menumbuhkan pasar baru. Selain itu menumbuhkan industri baru sekaligus membuka lapangan kereja baru bagi warga lokal, serta mengurangi ketergantungan usaha pada produk mentah. Terdapat lahan usaha perikanan seluas 1,6 Ha, \. Terdapat sentra tanaman hias yang berlokasi di kedua sisi Jl. Kol. Ahmad Syam. Kawasan wisata 10 Ha.

Dukungan sarana dan prasarana fisik yang diperlukan untuk PEL di Kelurahan Katulampa cukup tersedia. Infratraktur berupa jalan, transportasi umum dan logistik, pasokan listrik dan air, sanitasi yang memadai, pertokoan dengan total luas lahan 10 Ha, serta jaringan internet dan telekomunikasi yang mendukung pemasaran digital, akses informasi, dan komunikasi dengan mitra bisnis. Untuk sarana dan prasarana non fisik, terdapat lembaga keuangan bank dan koperasi dengan total berjumlah 85 unit untuk mendapatkan modal. Selain itu, terdapat beberapa kelompok tani yang mengoordinasikan produksi, distribusi, dan

pemasaran secara kolektif. Kelompok-kelompok tani tersebut antara lain Kelompok Tani Hydro Madam, Kelompok Wanita Tani Berkah, Kelompok Tani Dewasa Muara Farm, dan Kelompok Tani Bunga Desa.

PEL Berbasis Klaster.

Strategi Klaster adalah salah satu penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal yang memiliki pendekatan kewilayahan. Klaster adalah konsentrasi geografis berbagai kegiatan di kawasan tertentu yang satu sama lain saling melengkapi, saling bergantung, dan saling bersaing dalam melakukan aktivitas bisnis (Sumaryana, 2018). Dalam perkembangannya, suatu klaster harus terdapat kerjasama dan peran dari pemerintah, LSM, lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga riset dan pengembangan, lembaga keuangan, serta asosiasi usaha.

Klaster mengarahkan jalinan kerjasama industri dengan institusi yang lain yang bermanfaat dalam kompetisi, antara lain penyedia bahan baku seperti komponen, mesin, jasa dan penyedia spesialis infrastruktur. Klaster juga menghubungkan pembeli, perusahaan komplemen dan perusahaan dalam industri melalui ketrampilan, teknologi dan bahan baku. Pada akhirnya anggota klaster termasuk pemerintah dan institusi yang lain, seperti perguruan tinggi, agensi, pemikir, pendidikan kejuruan, asosiasi yang menyediakan pelatihan khusus, pendidikan, informasi, penelitian dan dukungan teknik. Dampak kompetisi dalam klaster menyebabkan peningkatan produktivitas perusahaan melalui inovasi dan perluasan serta perkuatan perusahaan di dalam klaster itu sendiri (Porter, 1998).

Berdasarkan teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa PEL berbasis klaster adalah pengembangan ekonomi lokal unggulan suatu wilayah geografis; baik unsur fisik dan sosial, yang secara terintegrasi mencakup seluruh rantai pasok dari tahap hulu ke hilir. PEL berbasis klaster yang berhasil akan berdampak pada meningkatnya penghasilan. Industrialisasi produk sumber daya alam dan lingkungan lokal berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan pendapatan masyarakat. Industrialisasi berbasis klaster meningkatkan daya saing produk lokal. Hal ini memberikan alasan bagi pemerintah untuk berinvestasi dengan membuat kebijakan yang membuka akses pasar lebih luas melalui beberapa mekanisme.

PEL berbasis klaster mendorong efisiensi produksi melalui pembelian bahan baku dalam jumlah besar secara kolektif oleh pelaku usaha. Hal ini memberi keuntungan mendapatkan harga yang lebih murah dari pemasok, mengurangi biaya per unit, dan menjamin ketersediaan pasokan. Pelaku usaha yang tergabung dalam suatu klaster lebih terlihat dan teroganisir. Kondisi tersebut mempermudah lembaga keuangan, seperti bank, akan lebih mudah melakukan penilaian kelayakan usaha. Faktor resiko usaha menjadi terlihat lebih rendah karena ditanggung oleh suatu klaster, bukan oleh per pelaku usaha. Hal ini membuka akses bantuan permodalan dari lembaga keuangan.

Klasterisasi memungkinkan adanya pemanfaatan infrastruktur dan sumber daya, seperti jalan, air, listrik, dan program pelatihan secara bersama dan berbagi penggunaan fasilitas produksi atau teknologi mahal. Hal ini mengurangi biaya operasional dan menarik bagi investor baru. Investasi ini nantinya menjadi modal pemerintah untuk menyediakan infrastruktur yang lebih baik berdasarkan data klaster mengenai sektor-sektor yang berpotensi tumbuh, tren dan standar pasar di dalam dan luar negeri bagi perluasan akses pasar dan efisiensi produk.

PEL yang berhasil ditandai dengan bertumbuhnya usaha kolektif klaster yang disertai dengan peningkatan omzet. Hal ini berarti penerimaan Pemerintah Daerah dari pajak juga akan meningkat. Ini mencakup pajak daerah yang relevan dengan aktivitas klaster, seperti Pajak Penerangan Jalan (untuk klaster industri) atau Pajak Restoran (untuk klaster kuliner).

Langkah-langkah pengembangan klaster ekonomi lokal:

- 1) Identifikasi dan pemetaan potensi: Lakukan survei untuk mengidentifikasi komoditas atau industri unggulan di daerah, serta ketersediaan bahan baku dan keterkaitan dengan usaha lain.
- 2) Pembentukan kelompok usaha: Bentuk klaster kelompok usaha untuk mengorganisasi para pelaku ekonomi, seperti UMKM dan petani.
- 3) Sosialisasi dan kolaborasi: Libatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, akademisi, dan tokoh masyarakat, untuk memastikan dukungan dan pemahaman yang sama.
- 4) Pengembangan strategi: Rancang strategi yang mencakup peningkatan kapasitas SDM, pengembangan kelembagaan, pemasaran, dan penerapan teknologi tepat guna.
- 5) Pengembangan infrastruktur: Sediakan infrastruktur yang memadai untuk mendukung aktivitas klaster, seperti akses transportasi dan fasilitas produksi.
- 6) Fasilitasi akses pasar dan modal: Bantu klaster dalam hal pemasaran produk dan akses ke sumber pendanaan dari lembaga keuangan.

Kelurahan Katulampa memiliki semua faktor yang mempengaruhi keberhasilan PEL tersebut, seperti sumber daya manusia, kondisi faktor produksi, kelembagaan/institusi, pasar, dan infrastruktur. Namun ketersediaan saja tidak cukup bila dari sisi kualitas, kuantitas serta keberlanjutannya rendah. Kendala tersebut membutuhkan dukungan dan komitmen Pemerintah Kota Bogor dan semua pihak yang berkepentingan.

i. Pengembangan klaster PEL berbasis UMKM.

Menurut Tambunan (dalam Sumaryana, 2018), Salah satu yang umum disarankan di dalam literatur mengenai UKM adalah mengembangkan UMKM yang kompetitif dengan pendekatan *clustering*. Kerjasama internal yang erat antar sesama UKM di dalam sebuah klaster (atau sentra industri) dalam pemasaran, pengadaan bahan baku, penelitian dan pengembangan, dan lain-lain. Selain itu, mengadakan kerjasama eksternal antara klaster dengan pihak-pihak lain di luar klaster seperti perbankan, lembaga penelitian dan pengembangan/universitas, BDS (business development services), departemen pemerintah, kadin, asosiasi bisnis, dan lain-lain. akan menghasilkan keuntungan aglomerasi karena kerjasama seperti itu menghasilkan efisiensi yang tinggi, dibandingkan UMKM yang beroperasi sendiri-sendiri.

ii. Pengembangan klaster PEL berbasis pariwisata.

Pengembangan ekonomi lokal berbasis klaster pariwisata adalah strategi yang berfokus pada pemanfaatan potensi wisata unggulan suatu daerah secara terintegrasi, mencakup dari hulu ke hilir di semua unsur; seperti daya tarik, fasilitas, dan aksesibilitas, untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Kampung tematik adalah wilayah permukiman yang dikembangkan dengan identitas atau tema khusus berdasarkan potensi lokal, baik sosial, ekonomi, maupun budaya (Website Kelurahan Pandansari Kota Semarang, 2023). Dapat disimpulkan bahwa kampung tematik adalah salah satu program untuk mengembangkan ekonomi suatu kawasan lokal dengan mengangkat identitas tematik berbasis potensi sosial ekonomi unggulan setempat sebagai daya tarik wisata.

KESIMPULAN

Maka dengan mengacu pada uraian penyelesaian masalah dan kriteria kebijakan, diperoleh rumusan alternatif kebijakan sebagai berikut:

1. **Alternatif 1.** Merevisi dokumen perencanaan agar lebih memberikan ruang bagi aktivitas program pengembangan ekonomi lokal wilayah peri urban sebagai langkah aksi pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengurangi angka pengangguran yang diakibatkan urbanisasi ke wilayah pinggiran kota dengan tetap memprioritaskan kelestarian lingkungan.
2. **Alternatif 2.** Membuat suatu program pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan masyarakat mampu atau warga dari kelompok ekonomi menengah ke atas sebagai mitra Pemerintah, narasumber, tenaga ahli yang mendampingi, mentransfer ilmu, memfasilitasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat kepada sesama warga Kelurahan Katulampa.
3. **Alternatif 3.** Menyusun perencanaan pembangunan Kelurahan Katulampa dengan konsep Pengembangan Ekonomi Lokal yang mengintegrasikan klaster tematik berbasis UMKM dan pariwisata.
4. **Alternatif 4.** Membuat program penguatan peran dan kontribusi filantropi melalui pembentukan forum atau platform yang mempertemukan lembaga filantropi, perusahaan melalui program CSR-nya, serta organisasi masyarakat sipil untuk mengidentifikasi masalah dan merancang solusi pembangunan ekonomi secara bersama-sama serta selaras dan bersinergi dengan prioritas arah dan tujuan pembangunan Kota Bogor.
5. **Alternatif 5.** Kebijakan penguatan produk unggulan lokal untuk meningkatkan

daya saing Kelurahan Katulampa. Mengembangkan komoditas pertanian lokal untuk menjadi produk unggulan yang ditingkatkan kualitasnya dan menjadi *local pride*.

Untuk menentukan alternatif mana yang akan dipilih sebagai kebijakan yang akan direkomendasikan, digunakan kembali pendekatan aspek kebijakan Bardach dengan skoring.

Berdasarkan proses skoring Bardach diperoleh nilai tertinggi adalah Alternatif Kebijakan Menyusun perencanaan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) berbasis kluster tematik UMKM dan pariwisata.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil skoring pada Tabel 3.2. di atas, nilai tertinggi ada pada alternatif kebijakan **Menyusun perencanaan PEL berbasis kluster tematik UMKM dan pariwisata**. Kebijakan tersebut memenuhi ke 4 kriteria Bardach (Tabel 3.2.) dengan penjelasan sebagai berikut:

- Dapat diimplementasikan dengan sumber daya, teknologi, dan keahlian yang dimiliki Kelurahan Katulampa. Kelurahan Katulampa memiliki komoditas pangan cukup beragam untuk didiversifikasi. Selain itu, terdapat 3 Kampung Tematik yang potensial sebagai destinasi wisata. Dari segi keahlian, telah disebutkan di bahasan sebelumnya bahwa angkatan kerja masyarakat Kelurahan Katulampa cukup berkualitas dengan jumlah lulusan SMA 25,43% dan Perguruan Tinggi 19,67%. Dari sisi teknologi, jaringan internet dan telekomunikasi dengan mudah dapat diakses di Kelurahan Katulampa untuk mendukung pemasaran digital, akses informasi, dan komunikasi dengan mitra bisnis. Informasi promosi dan publikasi destinasi wisata dan kuliner dapat dengan mudah dilihat di media sosial.
- Dapat dijalankan secara layak dari sudut pandang ekonomi dan keuangan. Di Kelurahan Katulampa terdapat beberapa lembaga keuangan bank dan koperasi yang cukup tersedia sebagai sumber permodalan. Selain itu, terdapat beberapa kelompok tani yang mengoordinasikan produksi, distribusi, dan pemasaran secara kolektif. Hal ini dapat disimpulkan bahwa roda perekonomian sudah berjalan dengan ditopang jasa keuangan lokal. Dari segi keuangan; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 telah mengamanahkan agar Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran paling sedikit 5% dari APBD (setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus) kota yang tidak memiliki desa untuk pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang dialokasikan ke dalam anggaran kecamatan pada bagian kelurahan untuk dimanfaatkan.

- Sudah adanya dukungan politik (legislatif), Pemerintah Kota Bogor, dan masyarakat terhadap PEL sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan amanah hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang harus dilaksanakan oleh daerah dan dituangkan dalam:
 1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
 2. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
 3. Peraturan Walikota Bogor Nomor 128 Tahun 2019 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018.
- Dapat diimplementasikan dan dikelola oleh sistem administrasi yang ada secara efektif karena:
 4. Tidak perlu membuat lembaga pengelola baru yang rumit. Pelaksananya adalah Perangkat Daerah (PD) yang sudah ada, seperti Dinas KUKM, Perdagangan dan Perindustrian; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPP); Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Ketenagakerjaan; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR); Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP); Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD); Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida); dan PD lainnya yang terkait.
 5. Program kerja antar PD disusun saling terintegrasi (crosscutting) dalam dokumen perencanaan, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.
 6. Sistem administrasi perizinan usaha, bantuan modal, dan regulasi terkait lainnya sudah ada dan dapat dioptimalkan untuk mendukung pengembangan kluster.

Konsep dari kebijakan pengembangan ekonomi lokal berbasis kluster UMKM dan pariwisata ini adalah integrasi pengembangan kluster UMKM yang mendukung kluster pariwisata untuk menciptakan ekonomi lokal yang kuat dan saling menguntungkan. Strategi pengembangan kedua kluster berfokus pada kemitraan strategis, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan produk berkelanjutan, dengan jабaran aksi.

Dengan mengintegrasikan kluster UMKM dan pariwisata ini, diharapkan pariwisata tidak hanya menjadi tujuan kunjungan, tetapi juga pendorong utama perekonomian lokal

yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Demikian tulisan ini dibuat dengan harapan bisa menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Bogor dalam upaya penguatan ekonomi lokal di Kelurahan Katulampa untuk mengatasi masalah pengangguran sebagai dampak urbanisasi di wilayah pinggiran Kota Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Jurnal Swarnabhumi Vol. 9, No.1, Agustus 2024. Shintaramesta123@gmail.com Shinta Program Studi Pendidikan IPS, Universitas Negeri Jakarta.
- **Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Klaster 6 Jan 2025. Radar Lombok.co.id.** <https://radarlombok.co.id/pengembangan-ekonomi-lokal-berbasis-klaster.html>
- Sugeng Budiharso, Unit Manajemen Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 29-30 Maret 2022-Mate3ri Pelatihan Daring Pusat Pengembangan Kawasan Perdesaan Yang Berdaya saing oleh Lembmaga Kajian Strategis KAHMI, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Universitas Nusa Bangsa dan Alumni Pengembangan Wilayah Perdesaan (APWD).
- Alfiando Oroh at all, Analisis Karakteristik Wilayah Peri Urban Berdasarkan Aspek Fisik di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, Jurnal Spasial Vol.6 No.2, 2019, ISSN 2442-3262.
- Fitriana Dewi Sumaryana, Pengembangan Klaster UMKM Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Usaha, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, Artikel, 2018.
- Pemberdayaan Masyarakat Melalui Progeram Bantuan UMKM: Studi Kasus Di Kelurahan Watang Bacukiki. Penulis: Firmawati A. Nurul Mutmainnah, M.Si. , Ian Tubangsa, M.Si., IAIN Pare-pare. 2024 <https://pmi.iainpare.ac.id/2023/11/pemberdayaan-masyarakat-melalui-program.html#:~:text=Berikut%20adalah%20beberapa%20faktor%20utama,pelaksanaan%2C%20dan%20evaluasi%20program%20pemberdayaan.>
- Simon Yanuaris Konorop, Strategi Pebijakan Pemerintah Dalam Mendorong Ketahanan Ekonomi di Tengah Tantangan Global, Jurnal Intelek Insan Cendekia, 2024.
- _____, Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Klaster, Radar Lombok.co.id, 6 Januari 2025, <https://radarlombok.co.id/pengembangan-ekonomi-lokal-berbasis-klaster.html#:~:text=Klaster%20Penerapan%20PEL%20yang%20memiliki%20pendekatan%2>

Okewilayahan,pemasaran%2C%20yang%20terkait%20dengan%20komoditas%20unggulan%
20lainnya.

- _____, Pengertian Kampung Tematik, Website Kelurahan Pandansari Kota Semarang, 2023, <https://pandansari.semarangkota.go.id/pengertian-kampung-tematik>.
 - _____, Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, <https://kalteng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/05/Tulisan-Hukum-Pembangunan-Sapras-Pemberdayaan-Masyarakat-Di-Kelurahan.pdf>.
- [1] Satria,etc, Peran Klaster Pariwisata Terhadap Ekonomi Kreatif Kkabupaten Banyuwangi Di Era Industri 4.0, Jurnal Keparowisataan Indonesia 15 (2) (2021), IE-ISSN:2685 – 9076, 2021, <https://ejournal.kemenparekraf.go.id/index.php/jki/article/view/217/59>.